

BAB II

TINJUAN LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Geografis

1. Tinjauan kabupaten Rokan hilir

Kabupaten Rokan hilir merupakan hasil pemekaran kabupaten Bengkalis dengan undang-undang no 53 tahun 1999. Wilayah ini terletak dibagian paling utara dari Propinsi Riau atau pada pesisir Timur pulau sumatra, yaitu antara 14°-2'30' lintang utara dan 100°-16'-101°-21' bujur timur. Berdasarkan letak geografis ini, Kabupaten Rokan hilir berada pada posisi yang strategis, yaitu jalur pelayaran internasional selat malaka. Hal ini menempatkannya menjadi salah satu lintas gerbang regional bagi Propinsi Riau dari/atau ke Malaysia maupun ke Sumatra Utara. Disamping itu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai keunggulan, dengan dekatnya wilayah administrasi dan aksesibilitas yang baik dengan kota Dumai yang salah satu fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan ahli muat angkutan Nasional dan Internasional.

2. Tinjauan Kecamatan Bagan Sinembah

Kelurahan Bagan Batu merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Balam Sempurna baru dikenal pada tahun 1988 M yang juga merupakan desa transmigrasi pada program pemerintah Orde Baru. Bagan Batu merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Bagan Sinembah yang termasuk

kedalam Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah mempunyai wilayah seluas 847,35 Km² sedangkan Kota Bagan Batu mempunyai wilayah seluas 99,99 Km², dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Kecamatan Bagan Sinembah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Simpang Kanan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako Bagan Batu terletak pada 50m di atas Permukaan laut. Jarak Bagan Batu dengan ibu kota Kabupaten yaitu Bagan Siapiapi adalah 68.00 Km.

Kegiatan mata pencarian masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah terbagi beberapa bagian seperti petani, pegawai, pedagang, buruh dan lain-lainya Struktur tanah berupa rawa dan gambut dengan ketebalan 75 sampai 300 Centimeter. Mengandung keasaman yang cukup tinggi yaitu antara 4 sampai 5 namun tanahnya sangatsubur Tanahnya cocok untuk tanaman pangan, pertanian, daerah ini tidak memerlukan pupuk buatan yang banyak, sebaliknya cukup menggunakan kapur pertanian. Lalu lintas antar desa maupun dari Desa ke pusat Kecamatan cukup lancar, dimana 10 Desa dijangkau dengan kendaraan beroda empat., merupakan Desa paling jauh lebih kurang 31 Kilometer dari Kelurahan bagan batu.

Tabel. II.1
Luas Wilayah Perdesa/ Kelurahan di Kecamatan bagan Sinembah

No	Nama Desa	Luas Wilayah (KM 2)
1	Baktera makmur	13,300
2	Gelora	920
3	Pelita	930
4	Kencana	910
5	Pasir putih	3,300
6	Balai jaya	1,450
7	Balam sempurna	24,600
8	Bagan sinembah	12,90
9	Panca mukti	13,45
10	Salak	1200
11	Harapan makmur	770
12	Bagan batu	910
13	Bagan manunggal	10,00
14	Bagan sapta permai	5,110
15	Bakti makmur	610
16	Bagan sinembah barat	15,70
17	Bagan sinembah utara	880
18	Jaya agung	9820
19	Meranti makmur	10,20
20	Pasir putih utara	16,00
21	Harapan makmur selatan	11,00
22	Bayangkara jaya	9,00
23	Makmur jaya	800
24	Bagan sinembah timur	610
25	Pasir putih barat	770
26	Balam sempurna kota	880
27	Bagan sinembah kota	800
28	Baktera makmur kota	10,20
29	Bagan batu kota	770
30	Balai jaya kota	550
31	Lubuk jawi	800
32	Suka maju	9,00
33	Bagan bakti	13,45
Jumlah Total		84,735

Sumber Data : BPS Rokan Hilir 2013

3. Penduduk

Pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kecamatan bagan sinembah adalah 51.937, yang terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 20.124 jiwa dan perempuan sebanyak 21.102 jiwa. untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah Perdesa
Keadaan Tabun 2012

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Baktera makmur	2,063	2,188	4,251
2	Gelora	1,86	984	2,070
3	Pelita	885	788	1,673
4	Kencana	999	972	1,971
5	Pasir putih	2,403	2,255	4,658
6	Balai jaya	2,793	2,974	5,767
7	Balam sempurna	6,563	6,306	12,869
8	Bagan sinembah	766	757	1,523
9	Panca mukti	1,040	1,004	2,044
10	Salak	577	506	1,083
11	Harapan makmur	608	604	1,212
12	Bagan batu	9,289	9,054	18,343
13	Bagan manunggal	1,228	1,202	2,430
14	Bagan sapta permai	819	836	1,655
15	Bakti makmur	2,888	3,685	6,573
16	Bagan sinembah barat	1,865	1,847	3,712
17	Bagan sinembah utara	1,005	869	1,874
18	Jaya agung	882	839	1,721
19	Meranti makmur	674	996	1,670
20	Pasir putih utara	1,256	1,086	2,342
21	Harapan makmur selatan	497	515	1,012
22	Bayangkara jaya	410	403	813
23	Makmur jaya	1,036	999	2,035
24	Bagan sinembah timur	809	726	1,535
25	Pasir putih barat	752	907	1,659
26	Balam sempurna kota	2,282	2,136	4,918
27	Bagan sinembah kota	1,580	1,503	3,083
28	Baktera makmur kota	2,103	2,063	4,166
29	Bagan batu kota	6,039	6,354	12,393
30	Balai jaya kota	3,615	3,690	7,305
31	Lubuk jawi	1,092	1,099	2,191
32	Suka maju	468	490	958
33	Balam jaya	2,941	2,675	5,616
	Jumlah	64,121	64,28	128,339

Sumber Data : BPS Bagan Sinembah 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang menempati posisi sebagai kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Bagan Batu Kota yang berjumlah 7.349 jiwa sedangkan

Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan bakti makmur yang berjumlah sebanyak 298 jiwa.

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Bagan Sinembah berasal dari berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Selain Suku Melayu yang merupakan Suku asli Kecamatan Bagan Sinembah, juga didiami oleh berbagai suku pendatang seperti Suku Minang, Jawa, Batak, dan juga suku Tionghoa yang meramaikan perekonomian di Kecamatan Bagan Sinembah.

4. Mata Pencarian

Mata pencaharian di suatu daerah sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, keadaan alam, dan kebiasaan - adat istiadat setempat. Kecamatan Bagan Sinembah yang selalu disinggahi oleh masyarakat pendatang karena terletak di jalur penghubung beberapa kota seperti Labusel dan Labuhan Batu dan kota-kota lainnya

Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mengakibatkan tingginya pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup, maka akan menimbulkan pengangguran di Kecamatan Bagan Sinembah merupakan wilayah yang penduduknya heterogen, sehingga menimbulkan keanekaragaman sosial, budaya, adat istiadat dan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Jenis lapangan kerja yang dijumpai pada penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat digolongkan kepada beberapa sektor, yaitu: sektor Pertanian, Perdagangan, Perternakan, Buruh, Pegawai Negeri, ABRI, angkutan dan lainnya. Jumlah penduduk yang bebeda dan dirinci menurut jenis lapangan kerja pada tahun 2013 di Kecamatan Bagan Sinembah dapat dilihat pada tabel II. 5 dibawah ini.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Kecamatan bagan sinembah Dirinci Menurut Jenis Lapangan Pekerja Tahun 2013

No	Jenis Lapangan Kerja	Banyak Oi-vva)	Persentase (%)
1	Pertanian	2.377	30,7
2	Perdagangan	992	12,8
3	Peternakan	506	6,5
4	PNS / ABRI	2.060	26,6
5	Angkutan	447	5,8
6	Buruh	1.364	17,6
	Jumlah	7.746	100 %

Sumber : Lurah/ Desa Kecamatan Bagan Sinembah 2013

Dari tabel 11.5 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lapangan keda yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah adalah pada sektor Pertanian sebanyak 2.377 jiwa atau 30 7 % dan sektor yang paling sedikit adalah sektor Angkutan sebanyak 447 jiwa atau 5,8 %.

B. Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Riau

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia terletak di -Jalan Jenderal Sudirman Nomor 223, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kewenangan yang dimiliki Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. PR.07.10 Tahun 2005, Tanggal 1 Maret 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Keputusan Presidens Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004, Tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Keda Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. PR.07.10 Tahun. 2005, Tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut

Pasal 1 ayat (1) berbunyi

"Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia yang berkedudukan di Propinsi Riau berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia".

Pasal 2 berbunyi :

“Kantor Wilayah mempunyai tugas pokok fungsi Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Fungsi dari Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia seperti dinyatakan dalam Pasal 3, Keputusan Presidens Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004, Tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keda Instansi Vertikal di Lingkungan

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, idem pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 sebagaiberikut:

- 1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian progam dan pengawasan;
- 2) Pembina hukum di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Kemigrasian, Administrasi Hukum Umum. dan Hak Kekayaan Intelektual.
- 4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan. Hak Azasi Manusia;
- 5) Pelayanan umum;
- 6) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan, hukum , dan disemunasi Hak Azasi Manusia;
- 7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrsi di lingkungan kantor wilayah

Mengenai pelayanan Hak Kekayaan Intelektual diatur oleh Keputusan Presiden Rebulik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Dapertemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, menurut pasal 42berbunyi:

Bidang pelayanan hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan permohonan pendaftaran, litimigasi dan sosialisasi hak dan batuan hukum serta adminiastasi hukum lainnya.

Tugas dari bidang pelayanan hukum terdiri dari 2 (dua) sub bidang, menurut Pasal 44 jo 45, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004yaitu:

- a. Sub bidang pelayanan hukum umum mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan pemberhentian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pegawai yang ada di wilayah, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari;
- b. Sub bidang penyuluhan dan bantuan hukum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan, dan koordinasi serta kerjasama dibidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Dalam hal perlindungan hak atas merek, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau telah mempunyai bidang yang disebut Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia, divisi ini dalam bidang perlindungan Hak, Atas Merek, melaksanakan sebahagian tugas dibidang Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia yang didasari kebijakan tehnik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal HKI Cq Direktorat Hak Atas Merek.

C. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dimana susunan Organisasi dan Tata

kerja tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 02 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksanaan dan salah satu sarana instansi teknis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir, khususnya dalam kebijakan di bidang Industri dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan, pembinaan, dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan.

Sesuai dengan pasal 195 Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas daerah Kabupaten Rokan Hilir bahwa tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah

1. Perumusan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Melaksanakan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, bimbingan, pembinaan., pengawasan, evaluasi dan penelitian serta pengkajian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi yakni

1. Singkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, Perdagangan dan Koperasi atas dasar keterpaduan kebijaksanaan

pemerintahan daerah dan departemen perindustrian dan perdagangan serta departemen koperasi.

2. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan Koperasi.
3. Bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi.
4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan Industri, Perdagangan dan Koperasi.
5. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi, badan lainnya serta organisasi atau asosiasi dunia usaha.
6. Bimbingan dan pengendalian pengusaha kecil menengah, pelaksanaan distribusi barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan.
7. Bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang kemetrolagian dan perlindungan konsumen.
8. Pelaksanaan pengurusan, fungsi dan wewenang lainnya yang diserahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Adapun yang menjadi fungsi dan tugas dinas Perindustrian yang terdapat Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Pengawasan petunjuk bimbingan teknis dan pembinaan, pengembangan

kegiatan usaha di bidang industri kerajinan umum, pangan, sandang dan industri lainnya

2. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi.
3. Penyiapan bahan pembinaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan di bidang industri, kerajinan umum, pangan, sandang dan industri lainnya.
4. Analisa iklim usaha dan peningkatan pembinaan dengan dunia usaha, terutama dibidang Industri.
5. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantduan penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan, yang merupakan pula fungsi dari Dinas perdagangan yang terdapat di kecamatan bagan sinembah

D. Gambaran Umum Usaha depot air minum

Depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah masih baru akan tetapi keberadaan depot air berkembang dari rumah kerumah saja secara alami, maksudnya tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari pihak pemerintah setempat, keberadaan Industri depot air minum dideerah ini disebabkan didaerah bagan sinembah merupakan suatu daerah yang peluang usaha disetiap kecamatannya, tidak itu juga didalamnya juga banyak terdapat

Depot air minum. Begitu pentingnya air bagi kehidupan membuat kita selalu berupaya mendapatkan air berupaya mendapatkan air bersih untuk memenuhi semua kebutuhan terutama untuk air minum. Dewasa ini masalah polusi, baik udara, tanah dan air sudah melewati ambang batas toleransi. Kita tidak bisa dengan gampang minum air yang tidak jelas sumber dan prosesnya,

termasuk air yang disuplai ke rumah-rumah, bahkan yang dijual di depot-depot isi ulang sekalipun. Depot air minum dengan konsep transparansi “INDUSTRI DAN PENGISIAN AIR MINUM TERPADU” pertama di Indonesia, menghadirkan mini plant sebuah pabrik air minum papan atas dengan produk ari pencucian botol sampai pengisiannya. Kalau masyarakat Semarang sekarang, khususnya pelanggan semakin besar dan berkembang, tidak ada salahnya mengikuti perkembangan usaha industri air minum dari awal berdirinya sampai saat ini bisa melayani setiap pelanggan dengan baik, terlepas dari hal-hal yang mungkin mengecewakan pelanggan. Mungkin pengalaman ini bisa menginspirasi pembaca dalam memulai sebuah usaha baru, Tiga (3) pelaku usaha yang telah terdaftar, dengan semakin majunya daerah Kecamatan Bagan Sinembah, maka keadaan ini tidak akan terlepas adanya persaingan oleh para pengusaha depot air minum isi ulang.

Pelaku usaha depot air minum khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah terdapat 15 (lima belas) pelaku usaha disetiap kelurahannya yang tersebar diantaranya, Kelurahan Bagan Batu 10 pelaku usaha terdiri dari 3 Pelaku usaha yang sudah terdaftar dan 7 Belum terdaftar. Kepenghuluan Gelora terdapat 1 pelaku usaha depot air minum dan belum terdafta. Kelurahan Bagan Sinembah ada 4 pelaku usaha depot air minum dan belum terdaftar kementerian Hukum dan Ham wilayah Riau. Jadi dengan demikian dari 15 pelaku usaha depot air minu, ada 12 pelaku uisaha yang belum mendaftarkan merek usahanya.